

97.115 LEMBAR SPPT PBB MULAI DIDISTRIBUSIKAN

Lebih Awal Bayar Pajak Bukti Nyata Bangun Yogya

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mendorong wajib pajak agar semakin tertib dalam membayarkannya dalam urusan pajak. Pembayaran pajak yang lebih awal bahkan menjadi bukti nyata partisipasi membangun Kota Yogya.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, menyebut pajak daerah menjadi salah satu kewajiban bagi setiap warga negara untuk memajukan daerahnya.

"Pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Ketika dibayarkan di awal waktu tentu itu akan semakin baik," sebutnya di sela penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025, Selasa (4/2).

Total ada 97.115 lembar SPPT PBB yang diterbitkan tahun ini. Seluruhnya mulai

didistribusikan melalui aparaturnya masing-masing. Pada kesempatan tersebut perwakilan wajib pajak PBB dari sektor kalangan usaha yang dinilai tertib juga turut diundang. Masing-masing dari PT KAI, Hotel Tentrem, Hotel Melia Purosani, Hotel New Saphir dan Lippo Plaza.

Sugeng menambahkan setiap tahun pihaknya juga memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang tertib dalam menunaikan kewajibannya. Termasuk wajib pajak PBB yang tahun lalu mampu terealisasi 106,64 persen dari target. "Capaian tahun lalu sudah di atas tar-

get. Artinya wajib pajak di Kota Yogya sangat baik. Apalagi saat sudah banyak kanal pembayaran pajak melalui digital maupun secara langsung, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayarkan kewajibannya," tandasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya RR Andarini, menambahkan salah satu tantangan dalam penerimaan PBB ialah pembayaran yang dilakukan mendekati jatuh tempo. Padahal pembayaran yang mepet memiliki risiko lupa hingga melewati batas waktu. Oleh karena

itu dirinya juga mendorong wajib pajak yang telah menerima SPPT PBB agar segera membayarkannya melalui kanal yang tersedia, tanpa harus menunggu jatuh tempo.

Tantangan lain ialah banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Yogya. Ini menyebabkan informasi tagihan melalui SPPT PBB menjadi kurang terakses. Kendati demikian, secara realita kondisi tersebut tidak menjadi kendala karena bisa dibayarkan melalui kanal digital kapan pun dan di mana pun. "Makanya mulai tahun ini kamu juga membuka pendaftaran SPPT PBB secara elektronik atau e-SPPT melalui pbb.jogjakota.go.id. Semuanya termasuk tagihan dan pembayaran bisa

dilakukan melalui akun Jogja Smart Service (JSS)," imbuhnya.

Sementara dari 97.115 lembar SPPT PBB tahun 2025, Pemkot Yogya menargetkan penerimaan hingga Rp 130 miliar. Target tersebut naik belasan miliar rupiah jika dibandingkan tahun 2024 lalu. Dengan beragamnya kanal pembayaran, pihaknya optimis capaian PBB tahun ini pun bisa di atas target. Terlebih sejumlah upaya jemput bola juga akan dilakukan dengan menggandeng PT Bank BPD DIY Cabang Senopati. Di antaranya pekan panutan pajak hingga jemput bola ke wilayah.

Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Senopati Gunawan Hasri Baskoro, mengaku sebagai mitra Pemkot Yogya



KR-Ardhi Wahdan

Penyerahan secara simbolis SPPT PBB oleh Pemkot Yogya kepada perwakilan usaha.

pihaknya juga tidak pernah berhenti berinovasi. Selama ini sinergi sudah terjalin dengan sangat baik melalui berbagai program pembayaran pajak yang menasar masyarakat langsung secara lebih dekat dan lebih cepat.

"Berbagai kanal di Bank BPD DIY bisa digunakan untuk membayar pajak. Mulai mobile banking, agen laku pandai, ATM hingga kantor layanan yang sudah tersebar di wilayah," ungkapnya. **(Dhi)-f**

STOK DI DIY DIJAMIN CUKUP

Masyarakat Diimbau Beli LPG 3 Kg di Pangkalan



KR-Fira Nurfitriani

Drs HM Idham Samawi beserta jajarannya berfoto bersama dengan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah (JBT).

YOGYA (KR) - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah (JBT) telah menawarkan akses kepada 78.304 pengecer yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Jawa Tengah (Jateng) dan DIY untuk beralih menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg sejak tiga bulan lalu. Upaya tersebut guna mendukung program Pemerintah melalui Kementerian ES-DM terkait distribusi LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Masyarakat diimbau membeli langsung di Pangkalan resmi supaya masyarakat bisa lebih banyak menikmati subsidi atau subsidi tepat sasaran.

Demikian disampaikan Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Taufiq Kurniawan didampingi Sales Area Manager Retail Yogyakarta Pertamina Patra Niaga Weddy Surya Windrawan dan Kevin Kurnia Gumilang saat bersilaturahmi dengan jajaran Direksi PT BP *Kedaulatan Rakyat*, Selasa (4/2). Kedatangan Taufiq diterima Direktur Utama PT BP KR Drs H Mohammad Idham Samawi, Imam Satriadi, Yuriya Nugroho Samawi, SE, Baskoro Jati Prabowo SSoos, Yoeko Indra Agung Laksana SE dan Ir Dyah Sardjuningrum Sitawati.

"Dari daftar sosialisasi tersebut, baru sekitar 458 pengecer dari 78.394 pengecer di Jateng dan DIY yang mau beralih menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg pada 22 Januari 2025. Artinya, masih banyak pengecer yang tidak mau dan telah menandatangani surat pernyataan tidak berkeinginan menjadi pangkalan resmi karena ribet," ujarnya.

Tetapi dengan adanya kebijakan yang baru ini, Taufiq berharap para pengecer atau warung tergugah lagi untuk menjadi pangkalan LPG resmi Pertamina demi kemakmuran masyarakat. Sebab masyarakat akan mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di DIY sebesar Rp 18.000 per tabung LPG 3 kg. Sehingga subsidi yang diberikan oleh Negara langsung diterima sasaran.

Terkait stok LPG 3 kg di DIY, pihaknya menjamin ketercukupan sebesar 1.288 Metrik Ton (MT). Sedangkan jumlah pangkalan LPG 3 kg di DIY sebanyak 8.013 pangkalan dengan rasio per desa sebanyak 18 pangkalan. Dengan volume penduduk desa yang dapat diperkirakan maka stok 50 tabung isi per pangkalan sudah di nilai bisa mengcover kebutuhan masyarakat. **(Ira)-f**

MENINGKAT DIBANDING TAHUN LALU

Imlek, Kunjungan Wisatawan Tembus 299.213 Orang

YOGYA (KR) - Momentum libur tahun baru China atau Imlek tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding periode sama pada tahun lalu. Dinas Pariwisata Kota Yogya mencatat saat libur panjang Imlek pada 25-29 Januari 2025 lalu tingkat kunjungan wisatawan mencapai 299.213 orang.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogya Sri Arika Wahyuningsih, menjelaskan pada periode yang sama libur Imlek tahun 2024 tingkat kunjungan wisatawan yang dibukukan mencapai 149.839 orang. "Ini menunjukkan kunjungan tahun ini meningkat drastis. Tetapi ini juga disumbang dengan momentum libur panjang yang saling berdekatan seperti peringatan Isra Miraj," terangnya, Selasa (4/2).

Menurutnya semakin banyak wisatawan yang memilih Kota Yogya sebagai destinasi liburan mereka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kawasan Malioboro tetap menjadi pusat kunjungan nomor satu bagi wisatawan. Namun demikian destinasi lain di Kota Yogya juga mengalami peningkatan jumlah pengunjung.

Ia menjelaskan, beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi antara lain Kraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Museum Benteng Vredeburg, Gembira Loka Zoo, dan Taman Pintar Yogyakarta. Menurutnya,

tren wisatawan yang berlibur di Kota Yogya ialah untuk menikmati wisata budaya dan sejarah, mencicipi kuliner khas, serta berbelanja souvenir di pusat-pusat perbelanjaan.

Arika menambahkan jika dibandingkan dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Dinas Pariwisata Kota Yogya juga mencatatkan total kunjungan wisatawan mencapai 612.936 orang. Meski angka kunjungan Imlek 2025 belum menyamai puncak keramaian Nataru, namun lonjakan signifikan ini menunjukkan bahwa Yogyakarta tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. "Kami terus berupaya menjaga kenyamanan wisatawan dengan berbagai upaya, seperti pengelolaan arus lalu lintas, peningkatan fasilitas, serta promosi wisata yang lebih luas agar kunjungan wisatawan ke Yogyakarta terus meningkat di masa mendatang," ungkapnya.

Seiring peningkatan kunjungan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tingginya okupansi hotel di Yogyakarta sepanjang Januari 2025 lalu. Bahkan tingkat keterisian hotel tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal itu menunjukkan jika Yogyakarta masih menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan ketika musim libur panjang. **(Dhi)-f**

DANAIS DIPANGKAS

Berdampak Pada Sejumlah Program

YOGYA (KR) - Efisiensi anggaran terhadap program keistimewaan sebagai dampak dari Inpres No 1/2025, akan dilakukan secara selektif termasuk untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kalurahan. Tindakan itu dilakukan karena dana keistimewaan juga ikut terpengang akibat kebijakan itu dari yang semula Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1 triliun.

Konsekuensi dari keterbatasan anggaran tersebut Pemda DIY akan melakukan efisiensi pada program-program yang masih memungkinkan untuk dikurangi atau ditunda. Salah satu contohnya adalah program pembangunan fisik, yang dinilai tidak bersifat mendesak dan masih bisa ditunda pengerjaannya.

"Program-program yang bersifat prinsipil dan esensial tetap akan berjalan seperti biasa. Misalnya, program keistimewaan yang berkaitan langsung dengan kebudayaan dan kesejahteraan masya-

rakat tetap diprioritaskan. Sedangkan dari aspek pembangunan, seandainya tahun ini mau membangun lima taman budaya, namun karena ada efisiensi anggaran dibangun tiga dulu, dua lainnya menyusul," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Selasa (4/2).

Beny mengatakan, selain proyek pembangunan fisik, Pemda DIY juga akan mencermati kembali alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada setiap kalurahan. Meski belum bisa memastikan berapa besar pengurangan anggaran BKK kalurahan, Pemda DIY akan mengevaluasi berdasarkan urgensi dan kebutuhan masing-masing program.

"Dana keistimewaan ini digunakan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah ditetapkan oleh Gubernur DIY, serta pemberdayaan masyarakat di kalurahan. Saat ini, tiap kalura-

han mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda-beda, tapi ke depan besar kemungkinan jumlah tersebut akan dikurangi," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemda DIY sebelumnya telah menganggarkan dana keistimewaan sebesar Rp 1,2 triliun ke berbagai macam program. Urusan Kelembagaan sebesar Rp 95,7 miliar, Urusan Kebudayaan Rp 760 miliar, Urusan Pertanian Rp 58,8 miliar, dan Urusan Tata Ruang Rp 285 miliar.

Menurutnya, setiap kalurahan memperoleh alokasi anggaran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan potensi dan kesiapan pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah.

Adapun beberapa bentuk BKK Dana Keistimewaan yang akan disalurkan ke kalurahan meliputi BKK WBTB, BKK Balai Budaya, BKK Desa Mandiri Budaya, BKK Desa Wisata, BKK Desa Preneur, dan lainnya. **(Ria)-f**

Kelurahan Gunungketur Siagakan Transporter Tiap RW

YOGYA (KR) - Uji coba aktivasi transporter atau penggerak untuk mendistribusikan sampah rumah tangga menuju depo dilakukan secara bertahap. Kini giliran Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman yang menyiapkan satu transporter di tiap Rukun Warga (RW).

Lurah Gunungketur Sunarni, menjelaskan operasional penggerak tersebut sudah dilakukan sejak Senin (3/2) lalu. Pihaknya menyiapkan satu transporter di tiap RW. "Kebetulan kami ada sembilan RW sehingga jumlah transporter juga ada sembilan orang. Tapi nantinya kami akan tambah lagi," ungkapnya, Selasa (4/2).

Setiap transporter yang bertugas juga dibekali kartu identitas sebagai bentuk legalitas serta pengakuan dari pemerintah. Hal ini sekaligus untuk memberikan jaminan bagi transporter dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan demikian warga yang sebelumnya membuang sampah secara mandiri ke depo, kini sudah dilayani melalui transporter menggunakan gerobak.

Sunarni menambahkan dengan beroperasinya para penggerak tersebut maka warga sudah tidak lagi dipotkan untuk membuang sampahnya ke depo. Apalagi mayoritas warga yang berdomisili di Gunungketur sudah tercatat sebagai pelanggan. "Dari sekitar 750 Kepala Keluarga (KK) warga Gunungketur yang berdomisili di tempat kami, sudah sekitar 90 persennya menjadi pelanggan gerobak transporter ini," tandasnya.

Dirinya pun sangat men-

gapresiasi para transporter dan warga karena sudah berperan aktif dalam pengelolaan sampah berbasis kewilayahan ini. Akan tetapi pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga meski sampahnya telah diangkut oleh penggerak transporter namun warga juga harus tetap memilah sampahnya di rumah mereka. Pasalnya jika tidak maka penggerak tidak akan mengambil sampah tersebut. "Pemilahan ini diperlukan untuk proses selanjutnya, yakni pengelolaan yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi kami tidak menggunakan depo. Warga wajib memilah," urainya.

Terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh warga, disesuaikan dengan kesepakatan warga di tiap RW. Hal ini lantaran mengacu regulasi berupa perda, retribusi sampah dipungut Rp 3.000 per bulan. Akan tetapi biaya itu belum termasuk ongkos untuk penggerak. Sehingga biaya tiap RW bisa berbeda. "Jadi tiap RW biayanya berbeda-beda tergantung kesepakatan mereka. Ada yang flat, tiap KK sama. Ada juga yang berbeda diukur dari banyaknya sampah yang diangkut," ungkapnya.

Dari hasil evaluasi hari pertama kemarin, satu penggerak rata-rata mampu mengangkut hingga 90 rumah atau pelanggan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses distribusi sampah dari rumah tangga menuju depo ialah dua jam. Dengan catatan, sampah yang diangkut sudah terpilah sejak dari rumah. **(Dhi)-f**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA
Jalan KRT Pringgonding No. 1, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon / Faksimile : (0274) 868401
Surel : pnslsleman@yahoo.co.id ; www.pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI
Nomor : 17/Pdt.Eks/2022/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2023 Nomor : 17/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 16 Desember 2024 Nomor : S-4404/KNL.0905/2024, dengan ini Panitia Pengadilan Negeri Sleman yang beralamatkan di Jalan KRT. Pringgonding Nomor 1 Beran, Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan penawaran melalui internet (*open bidding*) atas obyek sengketa perkara perdata Nomor : 17/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Panca Arta Monjali,
alamat : di Jalan Magelang Km. 9 Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon Eksekusi.

M e l a w a n

- Nyonya Sri Rahayu**, alamat : di Krapyak Kulon RT.001 / RW.00 Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon Eksekusi I.
- Tuan Senti Lalfalianto**, alamat : di Patukan RT.08 / RW.022 Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon Eksekusi II.

Yaitu berupa :

Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tanpa kecualli, tercatat dalam SHM Nomor 1472/Ambarketawang luas 125 m² (Seratus dua puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2.973 tanggal 03/04/1996, tanggal penerbitan sertifikat 24/09/1996, atas nama Tuan Senti Lalfalianto yang terletak di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sawah.
- Timur berbatasan dengan rumah bapak Bambang.
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan rumah bapak Agus Susanto.

- Nilai / Harga Limit : Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
- Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 19 Februari 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran Batas Akhir Penawaran : 19 Februari 2025, 10.30 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta

Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, penawaran melalui internet (*Open Bidding*) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id atau portal.lelang.go.id. Tata cara dan prosedur panduan penggunaan pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 di atas. Kemudian mengaktifkan akun dan merekam (Scan) KTP.NPWP (ekstensi file ".jpg/png"), dan nomor rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan pengubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan cicilan).
 - Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Jaminan disetor ke nomor *Virtual Account (VA)* peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang di lelang.
- Penawaran lelang di mulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Was Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHBT sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Perjalanan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgonding, Beran, Tridadi, Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091, 561909.

Sleman, 05 Februari 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PANITERA

DR. H. SUMARGI, SH., MH.
NP. 19710707 199103 1005